

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa terkait kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola keuangan desa berbasis *pro poor budget*, belum dapat terealisasi dengan baik dalam APBDes karena secara spesifik tidak ada *pro poor budget* yang diperuntukkan bagi keluarga yang paling miskin di desa. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan Aparat Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diketahui bahwa tingkat pendidikan yang tinggi tidak otomatis merumuskan anggaran yang *pro poor budget*. Pemerintah desa dan BPD sudah diberikan pelatihan terkait pelatihan cara pengelolaan keuangan desa serta pelatihan komputer. Akan tetapi, melihat kenyataan aparat Pemerintah Desa Golo Meni kurang bekerja maksimal terkait merumuskan anggaran yang *pro poor budget*. Terkait data tentang orang yang paling miskin di Desa Golo Meni, menunjukkan bahwa ada sebanyak 289 orang yang dikategorikan sebagai yang paling miskin, juga lebih diperparah lagi ketika tidak ada satupun anggaran yang khusus untuk orang yang paling miskin sehingga berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di desa.

2. Inisiatif Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Merumuskan dan Merancang Anggaran Yang *Pro Poor Budget*

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara dengan beberapa responden dapat disimpulkan bahwa Pemerintah desa dan BPD tidak memberikan usulan terkait orang yang paling miskin. Akan tetapi, masyarakat telah memberikan

usulan dan saran terkait anggaran yang *Pro Poor Budget*. Ditemukan bahwa tidak adanya kesetaraan gender dikarenakan tidak adanya inisiatif untuk kepentingan kaum perempuan. Usulan lebih banyak untuk kepentingan kaum laki-laki sedangkan kaum perempuan tidak dipedulikan. Oleh karena itu, kaum perempuan harus berjuang untuk mengaspirasikan kepentingan mereka baik di tingkat musdus sampai musrenbangdes.

3. Keterlibatan Orang Yang Paling Miskin dan Janda Dalam Anggaran Yang

Pro Poor Budget

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara dengan beberapa responden dapat disimpulkan bahwa Pemerintah desa sudah mengeluarkan surat berupa undangan kepada masyarakat guna untuk mengadakan pertemuan terkait dengan akan diadakannya perencanaan dan menyusun musrenbangdes. Melihat kenyataan bahwa orang yang paling miskin, para janda ikut terlibat serta memberikan masukan dan saran. Akan tetapi, usulan yang diberikan tidak terakomodir atau terealisasi karena alokasi anggaran tidak begitu besar terkait pemberdayaan masyarakat.

4. Pelatihan Dari Pemerintah Supra Desa (Kecamatan)

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara dengan beberapa responden di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah supra desa (Kecamatan) sudah pernah menyelenggarakan pelatihan berupa bimbingan teknis (bimtek) bagi Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Golo Meni terkait dengan *pro poor budget*. Bimtek tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengelola keuangan desa berbasis *pro poor budget*. Akan tetapi, kegiatan pelatihan tersebut tidak terlalu efektif karena hanya satu kali dan tidak ada rencana tindak lanjut

kegiatan tersebut. Ini yang menyebabkan kegalauan dan dilema terlebih bagi aparat desa dalam mengelola keuangan.

B. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan :

1. Pemerintah supra desa (Kecamatan) perlu melakukan pengembangan kapasitas terhadap Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis sehingga memiliki pengetahuan, pemahaman dan keterampilan tentang cara penyusunan anggaran yang lebih *pro poor budget*.
2. Proses penyusunan anggaran harus dilakukan secara partisipatif. Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus melibatkan seluruh komponen masyarakat terutama orang yang paling miskin. Kaum miskin dan perempuan mempunyai voice (suara), akses dan kontrol dalam kebijakan anggaran mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
3. Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mempunyai inisiatif. Terlebih khusus inisiatif untuk kepentingan kaum perempuan. Terkait inisiatif dari masyarakat, Pemerintah desa harus bersikap pro aktif dalam mendukung dan mengaspirasikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat khususnya masyarakat yang dikategorikan paling miskin dalam mengatasi kesenjangan sosial di masyarakat demi terciptanya pembangunan yang merata.
4. Pemerintah Kabupaten (Kecamatan) terus melakukan pelatihan dalam rangka penguatan kelembagaan di tingkat desa terutama yang berkaitan pengelolah keuangan desa untuk mengatur dan mengelola dana desa

tersebut sehingga tidak melanggar mekanisme yang ada. Dan juga diperlukan adanya kebijakan awal seperti *pro-poor policy* (kebijakan umum yang memihak pada orang miskin), *pro-poor institutions* (adanya institusi-institusi – khususnya institusi pemerintah – yang memihak orang miskin), dan yang lebih penting lagi adalah adanya *pro-poor government* (pemerintahan yang memihak orang miskin). Tanpa adanya pra-syarat kebijakan seperti ini, sulit mengharapkan pemerintah (daerah) untuk mempunyai kebijakan anggaran yang bersifat *pro poor*.

5. Perlu dibentuk sebuah wadah/pengorganisasian dari kaum perempuan terlebih khusus para janda. Dengan demikian, dengan melihat kekuatan, tekad yang sama dari kelompok para janda Pemerintah desa akan membuka mata sehingga kepentingan mereka dapat terakomodir.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Suharto, Didik G. (eds). 2016 : **Membangun Kemandirian Desa**, Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), Yogyakarta

Subekhi Akhmad dan Jauhar Mohammad (eds). 2012 : **Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)**, Prestasi Pustakaraya, Jakarta

Sujarweni V. Wiratna (eds). 2015 : **AKUNTANSI DESA Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, Pustaka Baru Press, Yogyakarta

Undang-Undang Desa (eds). 2014 (**UU RI No. 6 Tahun 2014**), Sinar Grafika Offset, Jakarta

Widjaja, HAW (eds). 2003 : **Pemerintahan Desa/Marga**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

INTERNET :

docplayer.info/31238034-Pro-poor-budget-kebijakan-anggaran-dalam-upaya-pengentasan-kemiskinan.html. diakses pada tanggal: Kamis, 23 Februari 2016 pukul 15.46 WITA.

www.google.com/search=dasar+teori+tata+kelola+keuangan&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab. Diakses pada tanggal 27 Maret 2017 pkl 17.35 WITA.

propoorbudgeting, Lembaga Penelitian SMERU, Thn 2003.

Sugyono, rayendar.blogspot.co.id/2015/06/metode-penelitian-menurut-sugiyono-2013.html

JURNAL :

Ulima Islami dalam *Jurnal* digilib.unila.ac.id/22459/3/SKRIPSI %20TANPA%20BAB %20PEMBAHASAN.pdf. Thn 2016. *Kapasitas-Aparatur-Desa-Dalam-Tertib-Administrasi-Desa*. Ilmu Pemerintahan Fisip. Lampung. Hlm.2.

Aidinil Zetra dalam *Jurnal SINERGI* vol.6 No.1, Thn 2009, *Strategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. hlm. 5-6.

Zuliarti dalam *Jurnal* Eprints.umk.ac.id/602/10/skripsi-penuh.pdf. Thn 2012.

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, hlm. 33

Titiek Puji Astuti, Yulianto dalam *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1 (2016) : 1-14, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No.6 Thn 2014*. Hlm 4

\

PEDOMAN WAWANCARA

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Asal :

II. DAFTAR PERTANYAAN

 Bagi Aparat Pemerintah Desa

1. Apakah bapak sudah mengikuti jenjang pendidikan formal ?
2. Apakah bapak berpendidikan nonformal ?
3. Menurut bapak, jika berpendidikan nonformal, apa saja bentuk kegiatan yang diikuti dalam anggaran yang *pro poor budget* ?
4. Menurut bapak, apakah ada usulan, saran dari bapak ketika mengadakan kegiatan yang *pro poor budget* ?
5. Bagaimana cara/metode yang digunakan bapak untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan menyusun musrembangdes ?
6. Menurut bapak, apakah dalam penyusunan anggaran yang *pro poor budget* masyarakat dilibatkan semua ?
7. Menurut bapak, apa saja jenis pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah supra desa (kecamatan) dalam anggaran yang *pro poor budget* ?

 Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Apakah bapak sudah mengikuti jenjang pendidikan formal ?
2. Apakah bapak berpendidikan nonformal ?
3. Menurut bapak, jika berpendidikan nonformal, apa saja bentuk kegiatan yang diikuti dalam anggaran yang *pro poor budget* ?
4. Menurut bapak, apakah ada usulan, saran dari bapak ketika mengadakan kegiatan yang *pro poor budget* ?
5. Bagaimana cara/metode yang digunakan bapak untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan menyusun musrembangdes ?
6. Menurut bapak, apakah dalam penyusunan anggaran yang *pro poor budget* masyarakat dilibatkan semua ?
7. Menurut bapak, apa saja jenis pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah supra desa (kecamatan) dalam anggaran yang *pro poor budget* ?

 Bagi Masyarakat

1. Menurut bapak/ibu, apakah Pemerintah Desa dan BPD sudah berpendidikan formal ?
2. Menurut bapak/ibu, apakah ada usulan, saran dari masyarakat ketika mengikuti kegiatan anggaran yang *pro poor budget* ?
3. Bagaimanakah cara Pemerintah Desa dan BPD untuk melibatkan masyarakat dalam mengikuti perencanaan dan penyusunan anggaran yang *pro poor budget* ?
4. Apakah dalam proses perencanaan dan penyusunan masyarakat pernah dilibatkan dalam anggaran yang *pro poor budget* ?
5. Menurut bapak/ibu, apa saja jenis-jenis pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan terhadap Pemerintah Desa dan BPD dalam anggaran yang *pro poor budget* ?

CATATAN :

Pedoman wawancara ini akan berkembang sesuai dengan jawaban yang disampaikan para responden. Terdapat kemungkinan adanya pertanyaan ikutan pada setiap pertanyaan dasar.

ORGANISASI DAN PERSONALIA

A. PEMBIMBING

1. Nama : Drs. Frans Bapa Tokan, MA
Jabatan : Pembimbing I
Hubungan kerja : Konsultan
Alamat : Fisip Unwira Kupang

2. Nama : Drs. Rodriques Servatius, M.si
Jabatan : Pembimbing II
Hubungan kerja : Konsultan
Alamat : Fisip Unwira Kupang

B. PENELITI

- Nama : Ignasius Yohanes Raja
No. Regis : 411 13 004
Jabatan : Peneliti
Alamat : Fisip Unwira Kupang

CURICULUM VITAE

Identitas Diri :

- a. Nama : Ignasius Yohanes Raja
- b. TTL : Dalo, 01 Februari 1995
- c. Umur : 22 Tahun
- d. Nama Orang Tua
 - Ayah : Gerardus Radu
 - Ibu : Margareta Janum
- e. Anak ke : Keenam dari enam bersaudara
- f. Agama : Katolik
- g. Golongan Darah : O
- h. No. Hp : 081237224289

Riwayat Pendidikan

- a. SD : SD Katolik Mukun 1
- b. SMP : SMPK Pancasila Mukun
- c. SMA : SMAK St. Arnoldus Mukun
- d. Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Widya Mandira Kupang